Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 3, Issue 10, May 2026, P 151-160
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20176246

Analisis Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMP Negeri 9 Pekanbaru

The Analysis of Educational Facilities and Infrastructure Standards at SMP Negeri 9 Pekanbaru

Moza Rifanni Rezpa[1], Rahmat Fahmi[2]
Pendidikan Masyarakat, Universitas Riau

ARTICLE INFO
Riwayat artikel:
Received 23 April 2026
Revised 25 April 2026
Accepted 30 April 2026
Available online 13 May 2026

Keywords
Educational Facilities and Infrastructure; SMP Negeri 9 Pekanbaru; National Education Standards; Mixed Methods; Tenayan Raya
Keywords:
Sarana Prasarana Pendidikan; SMP Negeri 9 Pekanbaru; Standar Nasional Pendidikan; Mixed Methods; Tenayan Raya

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
The fulfillment of educational facilities and infrastructure standards constitutes a fundamental prerequisite for quality and equitable learning processes. This study aims to analyze the condition of facilities and infrastructure at SMP Negeri 9 Pekanbaru within the framework of the 6th National Education Standard (SNP) as regulated by Permendikbudristek Number 22 of 2023. The research employed a mixed methods approach with a sequential explanatory design, combining quantitative data analysis from Dapodik Kemendikdasmen and the Infrastructure Management Information System (SIMSARPRAS) of the Pekanbaru City Education Office, with qualitative document analysis of relevant regulations and academic literature. SMP Negeri 9 Pekanbaru was established in 1981, is located in Tenayan Raya District, and received Grade A accreditation in 2021 with a final score of 92. Dapodik data for Semester 2025/2026 (Even) indicates the school serves 1,086 students, 47 teachers, and 13 administrative staff, with a total of 75 infrastructure units including 28 classrooms and 4 laboratories. Findings indicate that the school generally possesses adequate core infrastructure, yet several components require improvement, including the health room, library, administrative office, and various furnishings in moderate to severe disrepair. This study formulates concrete recommendations for relevant stakeholders to promote sustainable SNP compliance.

ABSTRAK
Pemenuhan standar sarana dan prasarana merupakan prasyarat mendasar bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang berkualitas dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi sarana dan prasarana di SMP Negeri 9 Pekanbaru berdasarkan kerangka Standar Nasional Pendidikan (SNP) ke-6 yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan desain sequential explanatory, memadukan analisis data kuantitatif dari Dapodik Kemendikdasmen dan SIMSARPRAS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dengan studi dokumentasi kualitatif terhadap regulasi dan literatur akademik yang relevan. SMP Negeri 9 Pekanbaru berdiri sejak 1981, berlokasi di Kecamatan Tenayan Raya, dan memperoleh akreditasi A pada 2021 dengan nilai akhir 92. Data Dapodik semester 2025/2026 Genap menunjukkan sekolah memiliki 1.086 peserta didik, 47 guru, dan 13 tenaga kependidikan, dengan total 75 unit sarpras yang mencakup 28 ruang kelas dan 4 laboratorium. Temuan mengindikasikan bahwa secara umum sekolah telah memiliki prasarana pokok yang cukup lengkap, namun terdapat sejumlah komponen yang memerlukan perbaikan, di antaranya kondisi ruang UKS, perpustakaan, ruang tata usaha, serta sejumlah perabot yang tercatat dalam kondisi rusak. Penelitian ini merumuskan rekomendasi konkret bagi pemangku kepentingan untuk mendorong pemenuhan SNP yang berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam perspektif kebijakan pendidikan internasional, penyediaan fasilitas fisik yang layak merupakan salah satu "*minimum core obligations*" yang wajib dipenuhi oleh negara dalam menjamin hak atas pendidikan setiap warga negara (Tomasevski, 2001; Coomans, 2007). Di tingkat nasional, kewajiban tersebut dioperasionalkan melalui Standar Nasional Pendidikan

*Corresponding Author
Email: E-mail: mozarifanni4310@student.unri.ac.id

(SNP), khususnya SNP ke-6 mengenai Standar Sarana dan Prasarana yang diatur melalui Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, sebagai regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang SNP, PP Nomor 4 Tahun 2022, dan berlandaskan pada amanat UUD 1945 Pasal 31 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tilak (2009) menegaskan bahwa penyediaan sarpras yang memadai merupakan kondisi prasyarat bagi tercapainya mutu pendidikan yang setara, sementara Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kecukupan fasilitas fisik pendidikan dengan capaian belajar peserta didik.

Kota Pekanbaru sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Riau yang masuk kategori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sangat Tinggi dengan nilai 83,02 pada 2023 (BPS Kota Pekanbaru, 2024), menyimpan paradoks yang layak dikaji secara mendalam. Di balik capaian makro yang membanggakan tersebut, pemerintah kota sendiri mengakui bahwa kondisi sarpras sejumlah satuan pendidikan masih belum memenuhi standar yang ditetapkan. Pada Maret 2025, Walikota Pekanbaru H. Agung Nugroho secara terbuka menyatakan komitmennya memperbaiki sarpras sekolah, mengakui masih terdapat fasilitas sanitasi yang belum memadai dan sejumlah sekolah yang kondisinya belum layak (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2025). Kondisi ini mencerminkan fenomena *implementation gap* dalam teori kebijakan publik (Pressman & Wildavsky, 1973; Mazmanian & Sabatier, 1983), yakni kesenjangan antara standar yang ditetapkan secara regulatif dengan kondisi nyata di lapangan.

SMP Negeri 9 Pekanbaru merupakan satuan pendidikan yang representatif untuk dikaji dalam konteks tersebut. Sekolah yang terletak di Jalan Imam Munandar No. 398, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya ini berdiri sejak 12 Desember 1981 dan memperoleh akreditasi A dengan nilai 92 pada tahun 2021 (BAN-SM, 2021). Sebagai sekolah yang berada di kawasan Tenayan Raya, salah satu kecamatan dengan pertumbuhan penduduk paling pesat di Pekanbaru, SMPN 9 menghadapi tekanan ganda yaitu melayani peserta didik dalam jumlah besar sekaligus mempertahankan kondisi sarpras yang sudah berusia lebih dari empat dekade. Wirsyah (2019) menemukan bahwa minimnya fasilitas sarpras di SMP Negeri di Kota Pekanbaru berkontribusi pada penurunan motivasi belajar peserta didik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan.

Nurmalinda (2025) dalam penelitiannya tentang pemeliharaan sarpras di SMP Negeri 23 Pekanbaru mengidentifikasi bahwa faktor penghambat utama pemeliharaan meliputi kurangnya kesadaran warga sekolah, keterbatasan biaya, dan lemahnya pengorganisasian yang sistematis. Temuan tersebut relevan sebagai titik pembanding dalam menganalisis kondisi SMPN 9 Pekanbaru, mengingat kedua sekolah beroperasi dalam sistem pengelolaan pendidikan yang sama di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Dalam perspektif yang lebih luas, Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan substantif manusia, dan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak merupakan salah satu dimensi kebebasan tersebut yang paling fundamental.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji kerangka regulasi Standar Sarana dan Prasarana dan relevansinya bagi SMP Negeri 9 Pekanbaru; (2) menganalisis kondisi faktual sarpras berdasarkan data yang terverifikasi; (3) mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar yang dipersyaratkan; serta (4) merumuskan rekomendasi konkret bagi para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *sequential explanatory*, yang memadukan metode kuantitatif dan kualitatif secara komplementer dan

berurutan. Creswell dan Plano Clark (2018) menjelaskan bahwa desain *sequential explanatory* menempatkan data kuantitatif sebagai fondasi utama yang kemudian diperdalam dan dikontekstualisasikan melalui data kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan sarpras pendidikan tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui satu metode tunggal; data numerik kondisi fasilitas memerlukan interpretasi kualitatif agar bermakna bagi pengambilan kebijakan (Sugiyono, 2019).

Komponen Kuantitatif

Komponen kuantitatif menggunakan analisis data sekunder berbasis statistik deskriptif. Sumber data utama meliputi: (1) data profil sekolah dan rekapitulasi PTK serta peserta didik semester 2025/2026 Genap dari Dapodik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; (2) data kondisi sarpras dari Sistem Informasi Manajemen Sarpras (SIMSARPRAS) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru; serta (3) data akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM). Data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel yang mengklasifikasikan komponen ruang dan fasilitas berdasarkan status kondisi: baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat, sesuai dengan sistem pendataan Dapodik.

Komponen Kualitatif

Komponen kualitatif menggunakan teknik studi dokumentasi dan analisis isi (*content analysis*). Dokumen yang dianalisis mencakup: (1) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana; (2) pernyataan resmi Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang dipublikasikan secara terbuka; (3) penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, yaitu Nurmalinda (2025) tentang pemeliharaan sarpras di SMPN 23 Pekanbaru dan Wirsyah (2019) tentang peran sarpras terhadap motivasi belajar di SMP Negeri se-Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru; serta (4) publikasi dari situs resmi SMP Negeri 9 Pekanbaru.

Analisis Data

Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif komparatif dengan membandingkan kondisi aktual sarpras SMPN 9 terhadap standar minimum yang dipersyaratkan Permendikbudristek No. 22/2023. Data kualitatif dianalisis melalui empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Integrasi kedua jenis data dilakukan pada tahap interpretasi, di mana temuan kuantitatif diperkaya dengan penjelasan dan kontekstualisasi dari data kualitatif. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan memverifikasi kesesuaian antara data Dapodik, SIMSARPRAS, dan pernyataan resmi pejabat pemerintah daerah.

HASIL

Profil SMP Negeri 9 Pekanbaru

SMP Negeri 9 Pekanbaru merupakan satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama berstatus negeri yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Sekolah ini berdiri pada 12 Desember 1981 berdasarkan Nomor SK Pendirian 05.01.07.06.00085 dan berlokasi di Jalan Imam Munandar No. 398, Kelurahan Tengkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau (Kemendikdasmen, 2026). Dalam hal mutu pendidikan, SMPN 9 Pekanbaru meraih akreditasi A berdasarkan Nomor SK Akreditasi 1347/BAN-SM/SK/2021 yang ditetapkan pada 8 Desember 2021 dengan nilai akhir 92, yang mencerminkan terpenuhinya berbagai komponen SNP dalam penilaian resmi BAN-SM (BAN-SM, 2021).

Berdasarkan data Dapodik Semester 2025/2026 Genap per tanggal 10 April 2026, SMPN 9 Pekanbaru memiliki total 1.086 peserta didik yang terdiri dari 540 peserta didik laki-laki dan 546 peserta didik perempuan. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) tercatat sebanyak

60 orang, yang terdiri dari 47 guru (7 laki-laki dan 40 perempuan) serta 13 tenaga kependidikan (7 laki-laki dan 6 perempuan). Data ini tersaji secara lengkap pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Data Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik SMPN 9 Pekanbaru Semester 2025/2026 Genap

Uraian	Guru	Tendik	PTK	Peserta Didik
Laki-laki	7	7	14	540
Perempuan	40	6	46	546
Total	47	13	60	1.086

Sumber: Dapodik Kemendikdasmen, data per 10 April 2026

Kondisi Sarana dan Prasarana SMPN 9 Pekanbaru

Berdasarkan data Dapodik yang mencakup dua semester terakhir, yakni Semester 2023/2024 Genap dan Semester 2024/2025 Ganjil, jumlah unit sarpras SMPN 9 Pekanbaru menunjukkan konsistensi pada angka 75 unit. Rincian data sarpras per jenis ruang disajikan pada Tabel 2 berikut.

Berdasarkan data SIMSARPRAS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, kondisi sejumlah komponen sarpras menunjukkan penurunan kualitas yang perlu mendapat perhatian. Terdapat 5 unit ruang kelas yang tercatat dalam kondisi rusak sedang, 1 ruang perpustakaan rusak sedang, 1 ruang UKS rusak berat, 1 ruang majelis guru rusak sedang, 1 ruang tata usaha rusak sedang, 1 kantin rusak berat, 10 unit lemari rusak berat, dan 10 unit papan tulis rusak berat. Data kondisi sarpras ini disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kondisi Komponen Sarpras SMPN 9 Pekanbaru yang Memerlukan Perhatian

No	Komponen Sarpras	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Ruang Kelas	5	0
2	Ruang Perpustakaan	1	0
3	Ruang UKS	0	1
4	Ruang Majelis Guru	1	0
5	Ruang Tata Usaha	1	0
6	Kantin	0	1
7	Lemari (unit)	0	10
8	Papan Tulis (unit)	0	10

Sumber: SIMSARPRAS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (2025)

Data Sanitasi

Data sanitasi SMPN 9 Pekanbaru yang tercatat dalam Dapodik menunjukkan kondisi yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Terdapat 7 unit ruang toilet yang tercatat, namun sejumlah variabel sanitasi seperti sumber air, tipe jamban, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan kondisi saluran pembuangan air limbah belum terdata secara lengkap dalam sistem Dapodik

(Kemendikdasmen, 2025). Ketidaklengkapan data sanitasi ini pada satu sisi mencerminkan tantangan pendataan yang sistemik, dan pada sisi lain menghambat perencanaan perbaikan yang berbasis bukti.

Dalam kerangka Permendikbudristek No. 22/2023, toilet harus tersedia sesuai rasio jumlah peserta didik, terpisah berdasarkan jenis kelamin, dan memperhatikan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dengan jumlah 1.086 peserta didik dan hanya 7 unit toilet yang tercatat, rasio toilet terhadap peserta didik di SMPN 9 adalah 1:155, jauh di atas ambang yang dipersyaratkan (Kemendikdasmen, 2026).

Nilai Akreditasi Standar Sarpras

Pada penilaian akreditasi tahun 2021, SMPN 9 Pekanbaru memperoleh nilai akhir 92 dengan predikat Akreditasi A. Nilai ini mencakup delapan komponen standar yang dinilai, termasuk Standar Sarana dan Prasarana. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pada saat penilaian, sekolah telah memenuhi ambang batas yang ditetapkan BAN-SM. Namun demikian, akreditasi bersifat periodik dan tidak memotret kondisi secara *real-time*. Kerusakan yang terdokumentasi dalam SIMSARPRAS kemungkinan besar merupakan kondisi yang terjadi setelah siklus akreditasi terakhir, dan mencerminkan dinamika pemeliharaan yang dihadapi oleh sekolah dengan usia infrastruktur yang sudah cukup lama (BAN-SM, 2021; SIMSARPRAS Disdikpku, 2025).

PEMBAHASAN

Kesesuaian Sarpras dengan Standar Regulasi

Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan jenjang SMP wajib memiliki prasarana minimal yang mencakup ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang bimbingan dan konseling, ruang OSIS, toilet terpisah berdasarkan jenis kelamin, ruang UKS, tempat ibadah, ruang guru, dan lapangan olahraga. Merujuk pada data Dapodik (Tabel 2), SMPN 9 Pekanbaru secara kuantitas telah memiliki seluruh komponen prasarana wajib tersebut. Keberadaan 4 laboratorium, perpustakaan, ruang konseling, ruang OSIS, ruang ibadah, ruang guru, toilet, dan tempat bermain/olahraga menunjukkan pemenuhan komponen yang relatif baik (Kemendikdasmen, 2025).

Namun, pemenuhan secara kuantitas belum cukup apabila tidak diikuti oleh kualitas kondisi yang layak. Data SIMSARPRAS (Tabel 3) mengungkapkan kesenjangan kualitas pada delapan komponen. Kondisi rusak sedang pada lima ruang kelas dan kondisi rusak berat pada ruang UKS merupakan persoalan yang paling mendesak. Dalam kerangka teori *implementation gap* (Pressman & Wildavsky, 1973), kondisi ini menunjukkan

bahwa standar yang ditetapkan regulasi belum sepenuhnya terealisasi di level satuan pendidikan. World Bank (2018) menegaskan bahwa investasi pendidikan yang tidak diimbangi dengan pemeliharaan fasilitas yang konsisten akan menghasilkan penurunan kualitas layanan yang pada akhirnya merugikan peserta didik.

Persoalan rasio toilet terhadap peserta didik layak mendapat sorotan khusus. Dengan 7 unit toilet untuk 1.086 peserta didik, rasio yang terbentuk adalah 1:155, jauh melampaui standar yang direkomendasikan WHO/UNICEF (2016) yakni 1:25 untuk perempuan dan 1:50 untuk laki-laki. Walikota Pekanbaru sendiri mengakui bahwa kuantitas toilet di sekolah-sekolah Pekanbaru belum sebanding dengan jumlah peserta didik (Pemerintah Kota Pekanbaru, 2025). Kondisi ini menciptakan risiko kesehatan yang nyata, terutama bagi peserta didik perempuan, sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian tentang sanitasi sekolah di negara berkembang (UNESCO, 2010).

Dampak terhadap Proses Pembelajaran

Kondisi rusak pada komponen sarpras memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas proses pembelajaran. Lima ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang berarti ratusan peserta didik belajar dalam lingkungan yang tidak kondusif secara fisik. Hanushek dan Woessmann (2015) menegaskan bahwa input pendidikan fisik, termasuk kelengkapan dan kualitas sarana ruang kelas, memiliki korelasi positif yang signifikan terhadap capaian belajar peserta didik. Dalam konteks Pekanbaru, Wirsyah (2019) menemukan bahwa minimnya sarpras yang layak berkontribusi secara signifikan pada penurunan motivasi belajar peserta didik SMP, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas proses pembelajaran.

Kerusakan berat pada 10 unit papan tulis secara langsung mengganggu efektivitas penyampaian materi oleh guru. Dalam perspektif teori konstruktivistik, media visual seperti papan tulis berperan penting dalam membantu peserta didik mengonstruksi pemahaman terhadap konsep-konsep abstrak (Vygotsky, 1978, dalam Levin & Lockheed, 1993). Ketiadaan papan tulis yang berfungsi baik memaksa guru menggunakan metode alternatif yang tidak selalu tersedia secara merata. Sementara itu, kerusakan berat pada ruang UKS menempatkan peserta didik dalam posisi rentan, terutama dalam situasi kedaruratan kesehatan ringan yang seharusnya dapat ditangani di sekolah tanpa peserta didik harus meninggalkan lingkungan sekolah.

Konteks Kawasan Tenayan Raya

Penempatan SMPN 9 di Kecamatan Tenayan Raya memberikan dimensi kontekstual yang penting. Tenayan Raya merupakan salah satu kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Pekanbaru, yang berarti tekanan terhadap kapasitas dan kondisi fasilitas pendidikan di kawasan ini terus meningkat. Soja (2010) dan Gamoran & Long (2007) mengingatkan bahwa ketimpangan sarpras antarsekolah dalam satu wilayah administrasi merupakan salah satu bentuk reproduksi ketidakadilan sosial yang paling persisten. Dalam perspektif ini, sekolah yang berusia lebih dari 40 tahun seperti SMPN 9 menghadapi tantangan pemeliharaan yang jauh lebih berat dibandingkan sekolah yang baru dibangun.

Pola pendekatan reaktif yang diidentifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru (2024), yakni merespons kerusakan yang telah terjadi alih-alih mencegahnya melalui perencanaan preventif, berpotensi menciptakan siklus defisit yang berulang (UNESCO, 2010; Todaro & Smith, 2015). SMPN 9, dengan usianya yang matang dan populasi peserta didik yang besar, memerlukan pendekatan perencanaan sarpras berbasis proyeksi kebutuhan jangka panjang, didukung oleh alokasi anggaran yang terencana dan konsisten.

Upaya Pemeliharaan dan Rekomendasi

Nurmalinda (2025) dalam penelitiannya di SMPN 23 Pekanbaru mengidentifikasi lima teknik pemeliharaan sarpras yang efektif: teknik penyadaran, pemahaman, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pendataan. Dari lima teknik tersebut, teknik pendataan dan pengorganisasian merupakan yang paling relevan untuk konteks SMPN 9, mengingat ketidaklengkapan data sanitasi dalam Dapodik dan kondisi perabot yang mengalami penurunan kualitas. Penguatan sistem pendataan sarpras secara berkala, sebagaimana yang dapat difasilitasi oleh SIMSARPRAS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, merupakan langkah awal yang fundamental sebelum perencanaan rehabilitasi dilakukan (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2025).

Dalam kerangka teori akuntabilitas pendidikan (Carnoy et al., 2003), mekanisme pelaporan kondisi sarpras secara berkala kepada Dinas Pendidikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Walikota Pekanbaru (2025) kepada seluruh kepala sekolah, merupakan langkah penting dalam membangun sistem informasi sarpras yang responsif. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat empat rekomendasi konkret:

1) Memprioritaskan rehabilitasi ruang UKS dan penggantian papan tulis serta lemari rusak berat sebagai bagian dari program pemeliharaan rutin berbasis data SIMSARPRAS.

2) Menyusun perencanaan rehabilitasi jangka menengah untuk lima ruang kelas yang rusak sedang, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan peserta didik di Kecamatan Tenayan Raya.
3) Melengkapi data sanitasi yang belum terisi dalam Dapodik sebagai dasar perencanaan peningkatan fasilitas toilet.
4) Mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS untuk komponen pemeliharaan sarpras secara transparan dan terencana, sesuai prinsip tata kelola pendidikan partisipatif (OECD, 2017).

Upaya Pemeliharaan dan Rekomendasi

Nurmalinda (2025) dalam penelitiannya di SMPN 23 Pekanbaru mengidentifikasi lima teknik pemeliharaan sarpras yang efektif: teknik penyadaran, pemahaman, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pendataan. Dari lima teknik tersebut, teknik pendataan dan pengorganisasian merupakan yang paling relevan untuk konteks SMPN 9, mengingat ketidaklengkapan data sanitasi dalam Dapodik dan kondisi perabot yang mengalami penurunan kualitas. Penguatan sistem pendataan sarpras secara berkala, sebagaimana yang dapat difasilitasi oleh SIMSARPRAS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, merupakan langkah awal yang fundamental sebelum perencanaan rehabilitasi dilakukan (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2025).

Dalam kerangka teori akuntabilitas pendidikan (Carnoy et al., 2003), mekanisme pelaporan kondisi sarpras secara berkala kepada Dinas Pendidikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Walikota Pekanbaru (2025) kepada seluruh kepala sekolah, merupakan langkah penting dalam membangun sistem informasi sarpras yang responsif. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat empat rekomendasi konkret:

1) Memprioritaskan rehabilitasi ruang UKS dan penggantian papan tulis serta lemari rusak berat sebagai bagian dari program pemeliharaan rutin berbasis data SIMSARPRAS
2) Menyusun perencanaan rehabilitasi jangka menengah untuk lima ruang kelas yang rusak sedang, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan peserta didik di Kecamatan Tenayan Raya
3) Melengkapi data sanitasi yang belum terisi dalam Dapodik sebagai dasar perencanaan peningkatan fasilitas toilet
4) Mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS untuk komponen pemeliharaan sarpras secara transparan dan terencana, sesuai prinsip tata kelola pendidikan partisipatif (OECD, 2017).

Upaya Pemeliharaan dan Rekomendasi

Nurmalinda (2025) dalam penelitiannya di SMPN 23 Pekanbaru mengidentifikasi lima teknik pemeliharaan sarpras yang efektif: teknik penyadaran, pemahaman, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pendataan. Dari lima teknik tersebut, teknik pendataan dan pengorganisasian merupakan yang paling relevan untuk konteks SMPN 9, mengingat ketidaklengkapan data sanitasi dalam Dapodik dan kondisi perabot yang mengalami penurunan kualitas. Penguatan sistem pendataan sarpras secara berkala, sebagaimana yang dapat difasilitasi oleh SIMSARPRAS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, merupakan langkah awal yang fundamental sebelum perencanaan rehabilitasi dilakukan (Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2025).

Dalam kerangka teori akuntabilitas pendidikan (Carnoy et al., 2003), mekanisme pelaporan kondisi sarpras secara berkala kepada Dinas Pendidikan, sebagaimana diinstruksikan oleh Walikota Pekanbaru (2025) kepada seluruh kepala sekolah, merupakan langkah penting dalam membangun sistem informasi sarpras yang responsif. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat empat rekomendasi konkret:

1) Memprioritaskan rehabilitasi ruang UKS dan penggantian papan tulis serta lemari rusak berat sebagai bagian dari program pemeliharaan rutin berbasis data SIMSARPRAS
2) Menyusun perencanaan rehabilitasi jangka menengah untuk lima ruang kelas yang rusak

sedang, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan peserta didik di Kecamatan Tenayan Raya

3) Melengkapi data sanitasi yang belum terisi dalam Dapodik sebagai dasar perencanaan peningkatan fasilitas toilet
4) Mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS untuk komponen pemeliharaan sarpras secara transparan dan terencana, sesuai prinsip tata kelola pendidikan partisipatif (OECD, 2017).

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa SMP Negeri 9 Pekanbaru secara kuantitatif telah memiliki komponen prasarana yang relatif lengkap sebagaimana dipersyaratkan oleh Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, dengan 28 ruang kelas, 4 laboratorium, perpustakaan, ruang BK, ruang OSIS, ruang ibadah, dan 7 toilet untuk 1.086 peserta didik. Pencapaian akreditasi A dengan nilai 92 pada 2021 memperkuat penilaian bahwa sekolah ini berada di jalur pemenuhan SNP yang baik. Namun demikian, data SIMSARPRAS mengungkapkan sejumlah kesenjangan kualitas yang memerlukan perhatian segera, di antaranya lima ruang kelas rusak sedang, ruang UKS rusak berat, kantin rusak berat, serta 10 unit lemari dan 10 unit papan tulis yang rusak berat. Rasio toilet terhadap peserta didik sebesar 1:155 juga menunjukkan perlunya penambahan atau peningkatan kapasitas fasilitas sanitasi. Temuan ini sejalan dengan konsep *implementation gap* dalam teori kebijakan publik dan menegaskan bahwa pencapaian akreditasi tidak menjamin kestabilan kondisi sarpras secara berkelanjutan tanpa pemeliharaan yang sistematis.

Saran utama yang dirumuskan adalah perlunya pergeseran paradigma pengelolaan sarpras dari pendekatan reaktif menuju pendekatan antisipatif berbasis data. Pemanfaatan SIMSARPRAS dan Dapodik secara aktif oleh Dinas Pendidikan, kepala sekolah, dan komite sekolah dapat menjadi fondasi bagi perencanaan pemeliharaan yang terencana dan berbasis bukti. Komitmen politik yang telah diperlihatkan oleh Walikota Pekanbaru melalui program Zero Sekolah Kondisi Buruk (2025) perlu diikuti dengan alokasi anggaran yang konsisten dan pengawasan masyarakat yang aktif, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip keadilan pendidikan SDG 4 (UNESCO, 2015) dan tata kelola pendidikan partisipatif (OECD, 2017).

REFERENSI

BAN-SM. (2021). Sertifikat akreditasi SMP Negeri 9 Pekanbaru No. 1347/BAN-SM/SK/2021. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

BPS Kota Pekanbaru. (2024). Statistik pendidikan Kota Pekanbaru 2023. BPS Kota Pekanbaru. https://pekanbarukota.bps.go.id

BPS Provinsi Riau. (2023, 1 Desember). IPM Riau 2023 mencapai 74,95—naik 0,58 persen. https://mediacenter.riau.go.id

Carnoy, M., Elmore, R., & Siskin, L. S. (Eds.). (2003). The new accountability: High schools and high-stakes testing. RoutledgeFalmer.

Coomans, F. (2007). Justiciability of the right to education. Erasmus Law Review, 2(3), 427–443.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE Publications.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. (2024). Prioritas di tahun 2024, Disdik Pekanbaru akan bangun sekolah baru hingga pengadaan meubeler. https://riau.bpk.go.id

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. (2025). Program Pekanbaru Zero ATS/APS tahun 2025. https://disdikpku.org

Gamoran, A., & Long, D. A. (2007). Equality of educational opportunity: A 40-year retrospective.

Dalam R. Teese, S. Lamb, & M. Duru-Bellat (Eds.), International Studies in Educational Inequality, Theory and Policy (Vol. 1, hlm. 23–47). Springer.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth. MIT Press.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Data sarpras SMP Negeri 9 Pekanbaru (NPSN 10403901), semester 2023/2024 genap dan 2024/2025 ganjil. Dapodik. https://dapo.dikdasmen.go.id

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Data PTK dan peserta didik SMP Negeri 9 Pekanbaru semester 2025/2026 genap, per 10 April 2026. Dapodik. https://dapo.dikdasmen.go.id

Levin, H. M., & Lockheed, M. E. (Eds.). (1993). Effective schools in developing countries. Falmer Press.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott Foresman.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Nurmalinda, N. (2025). Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Negeri 23 Pekanbaru [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repository UIN Suska Riau. https://repository.uin-suska.ac.id/88602/

OECD. (2017). Education at a glance 2017: OECD indicators. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/eag-2017-en

Pemerintah Kota Pekanbaru. (2025, 19 Maret). Walikota Pekanbaru komitmen benahi dan lengkapi sarana prasarana sekolah. https://pekanbaru.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022.

Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland. University of California Press.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.

SIMSARPRAS Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. (2025). Laporan sarana dan prasarana SMP Negeri 9 Pekanbaru. https://simsarpras.disdikpku.org/home/pdf_sekolah/251

SMPN 9 Pekanbaru. (2025). Website resmi SMP Negeri 9 Pekanbaru. https://www.smpn9pekanbaru.sch.id

Soja, E. W. (2010). Seeking spatial justice. University of Minnesota Press.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). Alfabeta.

Tilak, J. B. G. (2009). The role of education in development. Dalam J. Harriss, J. Hunter, & C. M. Lewis (Eds.), The new institutional economics and Third World development (hlm. 215–233). Routledge.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development (12th ed.). Pearson. Tomasevski, K. (2001). Human rights obligations: Making education available, accessible, acceptable and adaptable. Novum Grafiska.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UNESCO. (2010). Reaching the marginalized: EFA global monitoring report 2010. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2015). Education 2030: Incheon Declaration and Framework for Action. UNESCO Publishing.

WHO/UNICEF. (2016). Core questions on drinking water, sanitation and hygiene for household

surveys 2015–2020. UNICEF.

Wirsyah, H. K. (2019). Peranan sarana dan prasarana terhadap motivasi belajar pada pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan siswa di SMP Negeri se-Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru [Skripsi, Universitas Islam Riau]. Repository UIR. https://repository.uir.ac.id/7699/

World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to realize education's promise. World Bank.